

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS DAMPAK ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS (DOK) TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DI WILAYAH ADAT TABI PROVINSI PAPUA PERIODE 2014-2018**

**MENASER N RUMFANDU**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS DAMPAK ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS (DOK) TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DI WILAYAH ADAT TABI PROVINSI PAPUA PERIODE 2014-2018**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan Dijaukan Oleh

**MENASER N RUMFANDU**  
**A11114702**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# SKRIPSI

## ANALISIS DAMPAK ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS (DOK) TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DI WILAYAH ADAT TABI PROVINSI PAPUA PERIODE 2014-2018

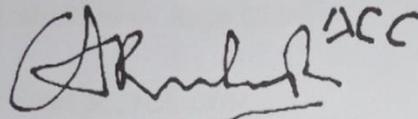
Disusun dan Diajukan Oleh

**MENASER N RUMFANDU**  
A1114702

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

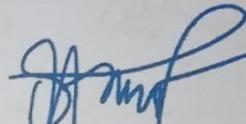
Makassar, 26 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Abd Rahman Razak, SE.,MS  
NIP. 19631231 199203 1 021

Pembimbing II



Dr. Sabir, SE.,M.Si.,CWM  
NIP. 19740715 200212 1 003

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fatta, SE.,M.Si  
NIP. 19690413 199403 1 003

## SKRIPSI

### ANALISIS DAMPAK ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS ( DOK ) TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DI WILAYAH ADAT TABI PROVINSI PAPUA PERIODE 2014-2018

Di susun dan Diajukan oleh

**MENASER N RUMFANDU**

**A11114702**

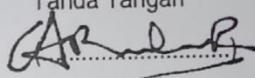
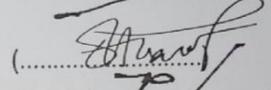
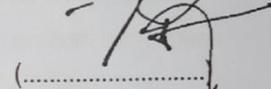
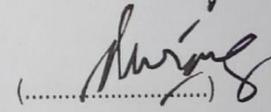
Telah di pertahankan dalam sidang ujian skripsi

Pada Tanggal 13 agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Abd.Rahman. Razak,SE.MS	Ketua	
2.	Dr. Sabir, SE., M.Si.,CWM	Anggota	
3.	Dr.Hamrullah, SE., M.Si.,CSF	Anggota	
4.	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si.,CWM	Anggota	

Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fata, SE., M.Si

Nip: 196904131994031003

## PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Menaser N Rumfandu  
Nomor induk : A11114702  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis  
Jenjang : Sarjana ( S1 )

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Analisis Dampak Alokasi Dana Otonomi Khusus ( Dok ) Terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan Di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua Periode 2014-2018 adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya terbukti bahwa sebagaim atau keseluruhannya adalah karya orang lain yang pergunakan dengan melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima saksi.

Makassar 26 juli 2021

Yang membuat pernyataan



  
Menaser N Rumfandu

A11114702

## PRAKATA

Puji syukur atas berkat dan rahmatnya yang di berikan oleh Tuhan yang Maha Esa dan Perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis dampak Penguasaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan Di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua Periode 2014-2018**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan baik. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya masukan dan kritik yang membangun, agar nantinya bisa dihasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik. penulis juga banyak mendapat dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada kedua orang tua saya dan orang tua angkat saya, **Bapak Daud Rumfandu dan ibunda Sula Moman**, dan **Bapak Felix Rumfandu dan Ibunda Oktovina Jakarimilena** atas doa dan dukungannya, baik dukungan moril maupun material. Semoga saja kita semua dilindungi dan di berkati oleh Tuhan yang Maha Esa
2. Saudara-saudariku Kakanda Mesak Rumfandu.ST baik buat adik adikku, Heriks Rumfandu,Cristina Rumfandu,Weros Rumfandu,

Leo Rurfandu, Rafael Rurfandu, Reny Rurfandu dan Metio Rurfandu kuharap kalian mampu menemukan apa yang harus kau perjuangan dalam hidup sehingga kalian menjalani hidup yang baik dan bermakna bagi banyak orang.

3. Bapak Ketua Jurusan Dr. Sanusi Fatta, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Dr. Abd.Rahman. Razak, SE.MS. selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis serta meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM. selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan, dan membimbing penulis serta meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM terimah kasih atas nasehat masukan, saran dan ilmunya sehingga saya dapat memperbaiki skipri ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih atas pembelajaran selama Tahun kuliah penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu guru di SD Inpres Arso VIII Kabupaten Jayapura, SMP Negeri 4 Arso Kabupaten Keerom , dan SMA Negeri 1 Arso Swakrasa Kabupaten Keerom Urbinasopen yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis sehingga

penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

9. seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas yang senantiasa memberi bantuan kepada penulis selama ini.
10. Kanda-Kanda, teman-teman Primes, dan adik-adik di Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi, Khususnya “Rumah Kita” Rumah Merah HIMAJIE dan juga keluarga besar IMP UNHAS, Dan HIMPELBISUNA yang telah menjadi tempat belajar kedua penulis. Terimah Kasih atas cerita, kisah, dan kenangan yang telah kita lukis bersama dikanvas kehidupan.
11. Teman-teman yang telah ditakdirkan Tuhan untuk bersama dalam melewati suka dan duka selama menyelesaikan studi di Fakultas ekonomi Universitas Hasanuddin, Yefta Manggaprouw, Keluarga besar IMP-UNHAS Terima kasih atas kebersamaannya, waktu yang mempertemukan kita, maka waktu pula yang memisahkan kita. Jika waktu mempertemukan kita dengan perpisahan maka akan kugunakan ingatan yang tak terbatas oleh waktu untuk mengobati rinduku. Akhnrnya, penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis.

Makassar, Agustus 2021

Menaser.N.Rumfandu

## **ABSTRAK**

**Menaser N Rumfandu.** *Analisis Dampak Alokasi Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan Di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua*(dibimbing oleh, **Dr. Adb Rahman Razak, SE.MS** dan **Dr .Sabir SE., M.Si.,CWM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Dampak Alokasi Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan Di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua* baik secara langsung maupun tidak langsung di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder time series untuk 3 kabupaten dan 1 kota selama 5 Tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Data dianalisis dengan menggunakan *Model regresi berganda* dengan bantuan *software SPSS 22*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung variabel DOK bidang pendidikan, DOK bidang kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif terhadap pembangunan bidang pendidikan.

**Kata Kunci** : Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Pembangunan Bidang Pendidikan.

## **ABSTRACT**

**Menaser N Rumfandu** analyzes the impact of the allocation of special autonomy funds on (Dok) development in the field of education in the tabi adat area of Papua province (supervised by, **Dr. Adb Rahman Razak, SE.MS and Dr .Sabir SE., M.Si.,CWM.**)

This study aims to determine the impact of the allocation of special autonomy funds on the development of the education sector in the tabi customary territory of Papua province, either directly or indirectly in the tabi customary territory of Papua province.

This research uses time series secondary data for 3 districts and 1 city for 5 years. data collection was done using descriptive and quantitative methods. The data were analyzed using a panel regression model with the help of SPSS 22 software.

The results of the study show that the variables in the field of education, health and infrastructure directly have a positive effect on the development of the education sector.

Keywords : Special autonomy funds (doc) and development in the field of education.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
8 .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Teoritis.....	9
2.1.1 Pembangunan Daerah.....	9
2.1.2 Pembangunan bidang Pendidikan .....	12
2.1.3 Undang-Undang Otonomi Khusus .....	13

2.1.4 Teori Desentralisasi Fiskal	18
2.1.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Pembangunan Bidang Pendidikan.....	22
2.1.6 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dengan Pembangunan Bidang Pendidikan.....	23
2.1.7 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang infastruktur dengan Pembangunan Bidang Pendidikan.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Pikir .....	26
2.4 Hipotesis Penelitian.....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.4 Metode Analisis Data .....	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	31
3.6 Defenisi Operasional .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua.....	36
4.1.1 Otonomi Khusus Papua.....	37

4.1.2	Gambaran Kinerja Makro Ekonomi Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua.....	39
4.1.3	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua .....	39
4.1.4	Perkembangan Tingkat Pengangguran Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua.....	40
4.1.5	PDRB Per Kapita Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua .....	41
4.1.6	Gini Rasio Di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua.....	42
4.1.7	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua.....	43
4.2	Perkembangan Variabel Penelitian .....	45
4.2.1	Indikator Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua.....	45
4.2.2	Perkembangan Usia Harapan Hidup di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua Tahun 2014-2018 .....	46
4.2.3	Perkembangan Indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama (RLS) Wilayah Adat Tabi Provinsi Provinsi Papua.....	47
4.2.4	Dana Otonomi Khusus Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua .....	49
4.3	Hasil Penelitian.....	50
4.3.1	DOK Bidang Pendidikan Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua .....	50

4.3.2	DOK Bidang Kesehatan Di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua .....	51
4.3.3	DOK Bidang Infrastruktur Di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua .....	51
4.4	Analisis Data .....	52
4.4.1	Hasil Regresi .....	52
4.4.2	Uji Siknifikansi Simultan (Uji F) .....	52
4.4.3	Uji Regresi Parsial ( Uji t).....	53
4.4.4	Koefisien Determinasi (Uji R2).....	54
4.5	Interpretasi Hasil .....	55
4.5.1	Pengaruh DOK Bidang Pendidikan (X1) Terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan .....	55
4.5.2	Pengaruh DOK Bidang Kesehatan (X2) Terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan.....	57
4.5.3	Pengaruh DOK bidang infrastruktur (X3) Terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>61</b>
5.1	Kesimpulan.....	61
5.2	Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>66</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Peta Wilayah Ada Tabi Provinsi Papua.....	36

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
4.1	Periodisasi Pola Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua.	38
4.2	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua Tahun 2014-2018 .....	40
4.3	Tingkat Pengangguran di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua dalam lima Tahun terakhir .....	40
4.4	PDRB Wilayah Adat tabi Provinsi Papua Tahun 2004-2018 .....	42
4.5	Gini Rasio Wilayah Adat tabi Provinsi Papua Tahun 2014-2018..	43
4.6	Jumlah Penduduk Miskin 2014-2018 (Ribu Jiwa).....	44
4.7	Indikator pembangunan Bidang Pendidikan Adat Tabi Provinsi Papua Tahun 2014 2018.....	45
4.8	Usia Harapan Hidup di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua Tahun 2014-2018 .....	47
4.9	Angka Melek Huruf (AMH) di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua Tahun 2014-2018 .....	48

4.10	Rata-rata lama sekolah (RLS ) di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua Tahun 2014-2018 .....	49
4.11	Dana Otonomi Khusus di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua Tahun 2014-2018.....	50
4.12	DOK Bidang Pendidikan di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua Tahun 2014-2018 .....	50
4.13	DOK Bidang Kesehatan di Wilayah Adat Tabi Provinsi Tahun 2014-2018 .....	51
4.14	DOK Bidang Infrastruktur di Wilayah Adat Tabi Provinsi Tahun 2014-2018 .....	51
4.15	Hasil Regresi Panel.....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan dibidang pendidikan merupakan suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia. Salah satu faktor penentu bagi kelestaraan dan kemajuan bangsa adalah sektor pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar media dalam menyampaikan dan meneruskan kebudayaan dari generasi ke generasi, melainkan dapat menghasilkan perubahan dan pengembangan kemajuan kehidupan bangsa. Keberhasilan program pendidikan dapat membantu kelancaran pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilakukan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan nasional tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pendidikan merupakan aspek yang menarik untuk dibahas, karena melalui usaha pendidikan diharapkan tujuan pendidikan akan dapat tercapai. Salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai dalam pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peningkatan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas hasil pendidikan.

Pendidikan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro, 2003).

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi politik dan melaksanakan pembangunan nasional. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan efek *multiplier effect* terhadap pembangunan suatu Negara, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Secara umum tingkat pendidikan dapat mewakili kualitas tenaga kerja karena dengan pendidikan, seseorang akan bertambah keterampilannya (Notoatmodjo, 2009)

Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Penyelenggaraan pembangunan daerah, Provinsi Papua mendapatkan hak otonomi khusus, berarti mendapatkan kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus kepentingan hidup dan kehidupan masyarakat dengan prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan, pemerintah dan masyarakat provinsi Papua mengemban tanggung jawab membangun daerahnya disegala bidang menuju masyarakat yang sejahtera, damai, adil dan makmur. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat berarti pula keharusan untuk meberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta dana bantuan otanomi khusus dari pemerintah pusat (alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara). Dalam pemberdayaan masyarakat secara khusus undang-undang otonomi khusus memberikan peran yang memadai bagi penduduk asli Papua. Peranan melalui majelis adat yang dibentuk dari tokoh tokoh adat, kepala-kepala suku menjadi sebuah majelis adat yang kemudian bersama-sama dengan pemerintah merumuskan dan menyusun kajian daerah sebagai strategi pembangunan daerah.

Wilayah adat Tabi yang meliputi ibu kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya. Salah Satu ciri khas yang membedakan wilayah adat tabi dengan wilayah ada lainnya, yaitu sistem pada kepemimpinan tradisional Ondofi ( kepala suku ) . salah satu ciri utama dalam sistem ondoafi adalah pewarisan kepemimpinan ke anak Laki-

laki Tertua. Dalam wilayah adat tabi , Adat yang terdiri dari suku besar sentani/Bhayaka/dafonsore utara ,moi,yokari ,jouwari ,oktim dan demutru.

Selama Periode Tahun 2002-2017, secara kumulatif jumlah Dana Otsus yang telah diterima oleh Provinsi Papua mencapai sebesar Rp60,79 trilyun, yang terdiri dari Rp48,08 trilyun berupa Dana Otsus Papua dan sebesar Rp12,70 trilyun berupa Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Papua.

Inilah yang menjadi sumber pendanaan utama dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah daerah tiap Tahun anggaran di Tanah Papua. Dalam penggunaan dana otonomi khusus berdasarkan undang-undang otonomi khusus nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya yaitu undang-undang nomor 35 Tahun 2008, diamanatkan bahwa kebijakan pembagian dana otonomi khusus dalam kerangka pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut: dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan dua persen (2%) dari dana alokasi umum (DAU) nasional yang terutama diperuntukan pada bidang pendidikan dan kesehatan; dana tambahan pembanguan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan oleh provinsi; Dana ini terutama digunakan dalam rencana pembangunan dalam 25 Tahun seluruh kota, kabupaten, distrik diprovinsi Papua tersambung jalan darat, laut dan udara yang berkualitas. Sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi Papua yang menguntungkan dan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional dan global. Dalam

penyaluran penggunaan otonomi khusus pembagiannya sebesar enam puluh persen (60%) diberikan untuk pemerintah kabupaten dan kota, dan empat puluh persen (40%) diberikan untuk pemerintah provinsi.

Bagaimana realisasi penggunaan dana otonomi khusus tersebut dirumuskan dan disusun oleh pemerintah Provinsi Papua sebagai kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan yang telah dilaksanakan hingga Tahun 2017 ini. Sudahkah dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan skala prioritas terutama dibidang pendidikan. Kenyataan secara empiris dilapangan menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia sebagai standar pembangunan manusia masih sangat rendah, dibawah standar jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai, tenaga kependidikan secara kuantitas/ kualitas kurang, batuan dana pendidikan bagi siswa dan mahasiswa anak-anak asli Papua kurang tepat sasaran. Hal ini diikuti pula oleh indeks korupsi sebagai isu akibat buruknya penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah otonomi saat ini, berpengaruh negatif terhadap hasil-hasil pembangunan dan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah tiap Tahun anggaran. Sehingga perlu dilaksanakan terhadap dibidang pendidikan melalui penelitian ini sebagai usaha ilmiah untuk memecahkan masalah pendidikan diprovinsi papua dalam pembangunan daerah supaya sesuai dengan tujuan pemberian dana otonomi khusus dan sesuai dengan harapan rakyat.

Dana Otonomi Khusus ( DOK ) Provinsi Papua selama kurun waktu 18 Tahun cenderung mengalami peningkatan. Dana Otonomi Khusus (DOK) yang dialokasikan tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan manusia yang ditempuh melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, anggaran tersebut juga dialokasikan bagi pengembangan infrastruktur dan untuk pemberdayaan bidang ekonomi kerakyatan. Keempat bidang ini ditetapkan dalam regulasi otsus karena merupakan indikator dasar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Papua. memiliki tujuan dimana memberikan kewenangan bagi rakyat Papua untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang dimiliki serta diberi pelimpahan tanggung jawab untuk memajukan, percepatan pembangunan baik dari segi politik ekonomi, budaya, pendidikan, terlebih tingkat kesejahteraan masyarakat. Selama implementasi otonomi khusus, pendidikan bermutu pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan umumnya hanya dapat dinikmati oleh masyarakat asli Papua yang tinggal di perkotaan dan sekitarnya. Sedangkan mereka yang berada di kampung kampung yang sulit diakses dari ibukota belum memperoleh layanan pendidikan yang memadai. Hal ini diperkuat oleh data dari sebuah yayasan lokal yang secara khusus didirikan untuk membangun pendidikan di Pegunungan Tengah Papua yang mengatakan bahwa kondisi pendidikan di Papua, terutama di daerah pedalaman di pegunungan Papua , Pesisir pantai atau pulau termasuk yang paling buruk di Indonesia. Hal lain yang terjadi yakni alokasi bantuan beasiswa juga menjadi sangat terbatas

dan tidak lancar. Padahal undang-undang Otonomi khusus Pasal 56 ayat 3 dan penjelasannya telah mengamanatkan perlunya alokasi pembiayaan seluruh atau sebagian biaya pendidikan bagi putra putri asli Papua pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh sebab itu Dinas pendidikan harus berperan aktif, terkait dengan program-program yang akan dilakukan mulai dari, TK SD,SMP,SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan mengingat betapa pentingnya kinerja anggaran bagi pembangunan, maka penulis merasa tertarik dan perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Dampak Alokasi Dana Otonomi Khusus (DOK) Terhadap Pembangunan Bidang Pendidikan di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua 2014-2018.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

Seberapa besar pengaruh Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan terhadap Pembangunan Pendidikan di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh :

1. Dana Otonomi Khusus (DOK bidang pendidikan terhadap Pembangunan Pendidikan Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan masalah yang dikemukakan, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Dampak Penggunaan Dana Otonomi khusus terhadap Pembangunan bidang pendidikan di Wilayah Adat Tabi provinsi papua.
2. Memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi papua sebagai referensi dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan untuk penggunaan dana otonomi khusus terhadap Pembangunan bidang pendidikan di Wilayah Adat Tabi provinsi papua.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang hubungan dana Otonomi khusus terhadap pembangunan di bidang Pendidikan , Dampak Penggunaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pembangunan bidang pendidikan di Wilayah Adat Tabi Provinsi Papua.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Pembangunan Daerah**

Definisi ataupun batasan pengertian pembangunan banyak diberikan oleh para sarjana dengan memberikan definisi yang berbeda. Perbedaan tersebut sebenarnya pada tekanan saja. Pada umumnya dari berbagai definisi yang saling berbeda tersebut sebenarnya saling melengkapi. Menurut Katz dan Seers pembangunan didefinisikan sebagai Proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (dalam Moeljarto, 1987:3).

Sedangkan menurut I Nyoman Beratha memberikan definisi Pembangunan sebagai suatu usaha-usaha perubahan-perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan pedoman-pedoman tertentu (1982:65).

Dari kedua pendapat diatas maka dapat diambil intinya bahwa pembangunan adalah :

- a. Suatu perubahan dari suatu situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih tinggi.
- b. Direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya untuk menuju keadaan yang lebih baik.

Dalam pencapaian setiap tahapan kemajuan dalam perubahan diharapkan dapat mencapai suatu keselarasan baik lahiriah maupun batiniah masyarakat dengan kadar pemerataan hasil-hasil baik pembangunan yang semakin meningkat tercermin dalam perbaikan hidup dan keadilan sosial. Hal ini berarti bahwa pembangunan yang berjalan terus menerus dan mencakup *being* dan *doing*, dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mempengaruhi masa depannya. Menurut Bryan dan White pengertian *being* dan *doing* berarti Proyek dan program-program bukan saja perlu membuahkan perubahan-perubahan yang fisik dan konkrit melainkan juga perlu menghasilkan hal-hal semacam itu dengan cara tertentu sehingga rakyat memperoleh kemampuan yang lebih besar untuk memilih dan memberikan tanggapan terhadap perubahan tersebut (1989:21).

Oleh karena itu pembangunan adalah upaya meningkatkan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan. Menurut Bryan dan White (1989:22) kapasitas mencakup 4 implikasi yaitu:

- a) Kapasitas, mencakup kapasitas bangsa dan komunitas untuk membangun lembaga-lembaga politik dan sosial yang bertanggung jawab atas produksi dan alokasinya.
- b) Keadilan, menyangkut masalah distribusi dalam arti kalau hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati hasilnya maka pembangunan dalam arti sebenarnya belum terjadi.

- c) Pemberdayaan (empowerment), untuk menjadikan rakyat mempunyai kuasa dan wewenang serta menggunakan pengaruhnya untuk mengangkat masalah- masalah mereka sendiri karena orang akan sulit mengembangkan kemampuan jika tidak ada perasaan pada dirinya bahwa pribadinya berdaya guna, tidak memiliki kesadaran akan dibawa kemana kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutannya.
- d) Proses yang berkesinambungan (sustainable), pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sejalan dengan perkembangan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Berdasarkan uraian di atas berarti fokus pembangunan terletak pada pembangunan masyarakat yang diartikan sebagai pembangunan untuk mewujudkan self sustaining capacity masyarakat itu sendiri. Menurut Moeljarto (1987:25), diartikan sebagai pembangunan yang berpusat pada manusia yang memandang manusia sebagai fokus utama maupun sumber utama pembangunan. Pembangunan yang berpusat pada manusia akan dapat mengubah peranan masyarakat sebagai penerima pasif pelayanan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan serta aktif di dalam pembangunan. Sedangkan menurut Gunawan Sumodiningrat (1998:51), ruang lingkup pembangunan

daerah meliputi semua kegiatan pembangunan sektoral, regional dan khusus yang berlangsung di daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Tujuannya adalah untuk lebih menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, meningkatkan dan menyetarakan laju pertumbuhan daerah, meningkatkan dan menyetarakan laju pertumbuhan antar daerah dan mempercepat pertumbuhan daerah yang tertinggal.

### **2.1.2 Pembangunan bidang Pendidikan**

Pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan SDM dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pemerintah memainkan peran alokasi dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia melalui pendidikan yaitu seberapa besar alokasi pengeluaran sektor pendidikan dan bagaimana proses pengalokasiannya. Menurut Guisan, (2010), efek utama dari investasi pendidikan untuk meningkatkan kepuasan hidup di negara-negara berkembang. Di samping itu, pendidikan juga memiliki efek positif pada indeks kualitas pemerintah, yang berkontribusi pada peningkatan PDB riil per kapita. Todaro (2004) bahwa dalam jangka panjang, output akan meningkat hanya jika modal manusia juga meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Ghozali (2005) menyatakan bahwa dalam teori *human capital*, pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang menanamkan ilmu pengetahuan,

keampilan atau keahlian, nilai, norma, sikap, dan perilaku yang berguna bagi manusia, sehingga kapasitas belajar dan kapasitas produktif manusia akan mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya kapasitas belajar dan kapasitas produktif dapat meningkatkan produktivitas dari seseorang sehingga pendapatan seseorang akan meningkat diiringi dengan meningkatnya *output* berupa barang dan jasa bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maryani, 2012; Mauriza dkk, 2012; Meylina, 2012; Laisina et al., 2015; Sanggelorang dkk, 2015), menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Badrudin dan Khasanah (2011); Habeahan (2015); Muliza (2017) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah disektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap pembangunan.

### **2.1.3 Undang-Undang Otonomi Khusus**

Menurut UU No. 21 Tahun 2001 otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang di akui dan di berikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prasaka sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat papua; sedangkan otonom sendiri menurut kamus bahasa indonesia adalah memerintah dan mengurus sendiri; sedangkan otonomi adalah daerah berpemerintahan sendiri. Otonomi Khusus Provinsi Paupa diatur dalam undang-undang

nomor 21 Tahun 2001. Kewenangan khusus yang diatur dalam undang– undang tersebut antara lain adalah kewenangan perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sosial (Ramses M. 2009:114– 115). Selain adanya kewenangan khusus, kebijakan otonomi khusus juga memberi peluang bagi diadopsinya karakteristik lokal kedalam sistem pemerintahan lokal dalam kerangka NKRI. Beberapa format khusus dalam pemerintahan Provinsi Papua yang diadopsi dari unsur–unsur lokal adalah:

- 1) Badan perwakilan daerah. Berbeda dengan badan perwakilan di provinsi lain, di papua terdapat badan perwakilan dengan sistem dua kamar (bi–kamaral), yaitu dewan perwakilan rakyat papua (DPRP) dan majelis rakyat papua (MRP). DPRP adalah perwakilan politik yang merupakan representasi partai–partai yang memperoleh kursi dalam pemilihan umum yang merupakan badan legislatif Provinsi Papua. Sementara itu, MRP merupakan representasi kultural orang asli papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak–hak orang asli papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pementapan kerukunan hidup beragama.
- 2) Kepolisian daerah. Kepolisian papua memiliki tugas di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah provinsi (perdasi), termasuk

pembiayaannya. Ketentuan ini mengalihkan fungsi polisi pamong praja kepada kepolisian daerah dan dengan demikian polisi pamong praja harus dilikuidasi.

3) Format keuangan dan pengelolaannya. Ada empat komponen keuangan yang membedakan antara penerimaan di Provinsi Papua (pada masa otonomi khusus) dengan penerimaan di provinsi lain di Indonesia. *Pertama*, dana bagi hasil minyak bumi. Pasca Otonomi Khusus, Provinsi Papua berhak menerima dana bagi hasil minyak bumi sebesar 70% sementara di provinsi lain hanya 15,5%. *Kedua*, dana bagi hasil gas alam. Sama dengan minyak bumi, Provinsi Papua berhak menerima dana bagi hasil sebesar 70% sementara provinsi lain 30,5%. *Ketiga*, dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dana alokasi umum nasional. *Keempat*, dana tambahan dalam rangka otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dengan DPR atas masukan dari pemerintah Provinsi Papua. Otonomi khusus diharapkan membawa perubahan atas perekonomian Provinsi Papua. Menurut para ahli ekonomi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Tanah dan kekayaan alam. Kekayaan alam suatu daerah meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang

yang tersedia. Secara umum, daerah yang memiliki kekayaan alam berlimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya dibandingkan daerah yang kurang memiliki kekayaan alam.

b. Kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi. Dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai, akan dihasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil sehingga mampu menjadi pionir dalam pembangunan.

c. Kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Peranan barang modal sangat menentukan dalam meningkatkan produktivitas. Meningkatnya produksi barang atau jasa yang dihasilkan karena penemuan barang-barang baru, dan terciptanya barang dengan kualitas yang lebih baik tanpa meningkatnya biaya produksi.

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisional berupa upacara untuk berbagai kegiatan dan acara dianggap memperlambat pertumbuhan ekonomi.

e. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Luas pasar sangat penting peranannya dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat kegiatan suatu

perekonomian ditentukan oleh permintaan efektif, yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada permintaan efektif (Zakaria, 2006: 133-135). Dalam roda perekonomian daerah era otonomi seperti sekarang ini, ada beberapa pihak yang akan berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung dalam menentukan mulus tidaknya desentralisasi kewenangan perekonomian. Pihak-pihak tersebut adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dewan perwakilan daerah, investor asing, dan pengusaha lokal.

Terdapat dalam muatan kebijakan yang memang menjadikan Otonomi Khusus di Papua bersifat khusus yaitu: Pertama, adanya Majelis Rakyat Papua. MPR merupakan lembaga yang mempresentasi kultural orang asli Papua dan memiliki wewenang tertentu dalam rangkaian perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pementapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam UU otonomi khusus ini. Representasi kultural ini menjadikan hukum-hukum adat yaitu aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai saksi, kekhususan yang berkenaan dengan hak atas tanah ulayat

atau hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, diakui keabsahannya sebagai hukum formal.

#### **2.1.4 Teori Desentralisasi Fiskal**

Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari pusat ke daerah atas diterapkannya otonomi daerah yang merupakan ide dari desentralisasi, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Untuk merealisasikan ketentuan UU nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU nomor 32 Tahun 2004, maka pemerintah mengeluarkan UU nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Saragih, 2003).

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau pemerintahan atau pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Bird dan Vaillancourt, 2000).

Menurut Rochjadi (2006), desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi peronomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, *prinsip (rules) money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah, pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah. Namun, dalam pengelolaan pembiayaan tugas desentralisasi, prinsip efisiensi juga menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan (Bahl, 1999).

Litvack and Seddon (1998), di dalam Mauludin (2008) menyebutkan tiga pendekatan sebagai dasar di dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu (i) pendekatan penerimaan, (ii) pendekatan pengeluaran, (iii) pendekatan \komprehensif. Pendekatan penerimaan (*income approach*)

mempunyai arti bahwa daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak atau menyerahkan proporsi tertentu dari penerimaan pusat. Di samping itu terkadang dimodifikasi dengan tambahan transfer dana yang bersifat umum dan khusus untuk mengkompensasi perbedaan di dalam potensi penerimaan. Sisi penting yang perlu diperhatikan dalam desentralisasi fiskal tidak hanya pada sisi penerimaan saja, tetapi juga perlu dilihat dari sisi pengeluaran (*expenditure approach*). Pendekatan pengeluaran diartikan bahwa daerah diberi kewenangan untuk menetapkan pengeluarannya, selanjutnya akan dibiayai sebagian atau seluruhnya melalui transfer, salah satu transfer pemerintah pusat adalah dana perimbangan. Untuk mencapai salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal, yakni Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah dituntut untuk mengelolah keuangan daerahnya dengan baik dan mengalokasikan pengeluaran yang lebih besar untuk belanja langsung, khususnya belanja modal.

DOK termasuk transfer dana pemerintah pusat lainnya yang digunakan untuk pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah adalah pengeluaran dana termasuk pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan yang akan mengurangi pendapatan daerah. Pengeluaran daerah adalah pengeluaran kas daerah dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah (Sohidin, 2002).

Dana Otonomi Khusus merupakan transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi khusus yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mencerminkan upaya Pemerintah Indonesia dalam mencari solusi atas sejumlah masalah pelik di wilayah itu. Masalah-masalah ini mencakup: (1) konflik politik, terfokus pada tuntutan kemerdekaan Papua yang oleh pemerintah Indonesia dilihat sebagai gerakan separatis; (2) konflik sosial antarpenduduk Papua yang merupakan akibat dari ketiadaan solusi atas konflik politik; dan (3) kondisi ekonomi yang buruk, terutama yang dirasakan oleh penduduk asli Papua dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia serta Tingkat kemiskinan masyarakat Papua tergolong sangat tinggi dan berada di deretan paling bawah di antara daerah termiskin di Indonesia (World Bank, 2006).

#### **2.1.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Pembangunan Bidang Pendidikan**

Pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan SDM dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pemerintah memainkan peran alokasi dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia melalui pendidikan yaitu seberapa besar alokasi pengeluaran sektor pendidikan

dan bagaimana proses pengalokasiannya. Menurut Guisan, (2010), efek utama dari investasi pendidikan untuk meningkatkan kepuasan hidup di negara-negara berkembang. Di samping itu, pendidikan juga memiliki efek positif pada indeks kulaitas pemerintah, yang berkontribusi pada peningkatan PDB rill per kapita. Todaro (2004) bahwa dalam jangka panjang, output akan meningkat hanya jika modal manusia juga meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Ghazali (2005) menyatakan bahwa dalam teori *human capital*, pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang menanamkan ilmu pengetahuan, ketrampilan atau keahlian, nilai, norma, sikap, dan perilaku yang berguna bagi manusia, sehingga kapasitas belajar dan kapasitas produktif manusia akan mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya kapasitas belajar dan kapasitas produktif dapat meningkatkan produktivitas dari seseorang sehingga pendapatan seseorang akan meningkat diiringi dengan meningkatnya *output* berupa barang dan jasa bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maryani, 2012; Mauriza dkk, 2012; Meylina, 2012; Laisina et al., 2015; Sanggelorang dkk, 2015), menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Badrudin dan Khasanah (2011); Habeahan (2015); Muliza (2017) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah disektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM.

#### **2.1.6 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dengan Pembangunan Bidang Pendidikan**

Pada tingkat makro, umur harapan hidup dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Schultz (1961) dalam Craigwell (2012), mengatakan bahwa kesehatan telah menjadi dasar untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dalam masyarakat Barat. Mendapatkan standar tinggi kesehatan adalah hak asasi setiap orang dan juga dasar untuk mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Backman, *et al.*, 2008). Rajkumar (2008), Khausal (2013), dan Kim (2013), menunjukkan bahwa peningkatan dari pengeluaran kesehatan secara signifikan menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan harapan hidup, dan dapat mengendalikan kondisi sosial-ekonomi di negara-negara tertentu. Viyati dan Susilo (2016) menyimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil studi empiris lain yang dilakukan oleh Hamzah, *et al.* (2012), Meylina (2012) dan Sanggelorang (2015) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah Sektor kesehatan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks pembangunan Manusia. Hasil analisis ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro & Smith (2003), bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

#### **2.1.7 Hubungan Penegluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur dengan Pembangunan Bidang Pendidikan.**

Moderenisasi ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Dalam upaya mencapai dan mempertahankan pembangunan ekonomi yang tinggi, peran infrastruktur tetap kritis. Perkembangan infrastruktur haruslah selaras dengan pembangunan ekonomi. Upaya pembenahan kondisi infrastruktur disadari berperan penting dalam meningkatkan IPM dan dampaknya dalam jangka panjang bagi PDRB perkapita. Perbaikan infrastruktur memiliki kontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Peningkatan ketersediaan layanan-seperti produktif pendidikan, kesehatan dan dengan infrastruktur untuk masyarakat umum mungkin tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan. Studi empiris lainnya menjelaskan klaim teoritis yang meningkatkan akses ke layanan infrastruktur dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui dampaknya pada modal manusia - khususnya, pendidikan dan hasil kesehatan. Sistem transportasi yang lebih baik dan jalan yang lebih aman membantu meningkatkan kehadiran di sekolah (Brenneman dan Garitan, 2002).

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Otonomi Khusus atau Pemerintah khusus di Papua diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus No.21 Tahun 2001. Undang-Undang ini diberikan dengan maksud agar ada perhatian khusus dari Pemerintah Pusat terhadap semua sektor

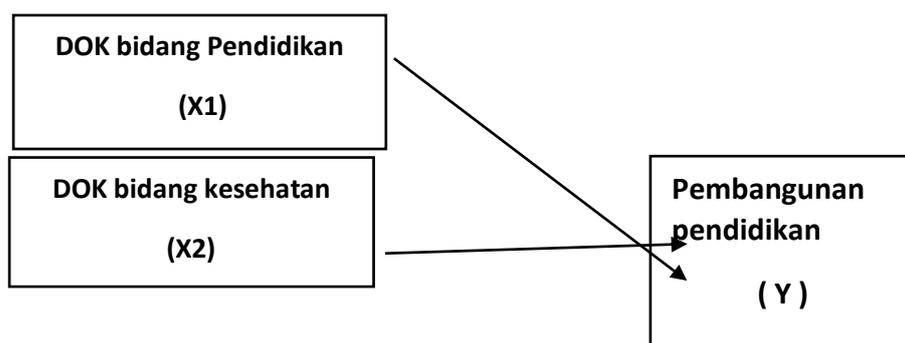
pembangunan di tanah Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana Otonomi Khusus pada Pemerintah Kota Sorong di Provinsi Papua Barat. Metode penelitian peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat di tarik kesimpulan, bahwa penggunaan anggaran dana otonomi khusus dititik beratkan kepada empat hal yaitu kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur. Anggaran Otonomi Khusus yang di salurkan Pemerintah Pusat ke Kota Sorong senantiasa mengalami peningkatan, selalu terealisasi penuh dan tidak terjadi penyimpangan. ( Sisca Mediyanti 2019 ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan, Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan bidang kesehatan dan Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Merauke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan berpengaruh signifikan secara positif terhadap pertumbuhan

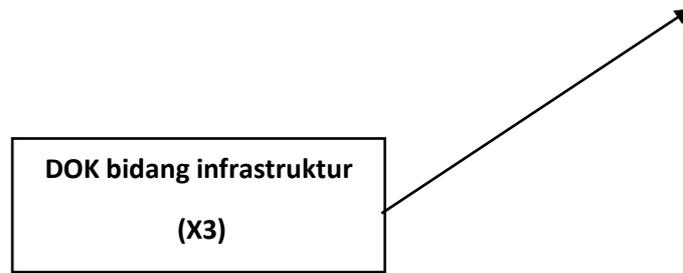
ekonomi secara langsung, secara tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (Yuan Willason Tamberan dan Rumaualdus Turu Putra Marp Djanggo. 2019). (Shinta Warouw, Grace Nangoy, Treesje Runtu .2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Maryani, 2012; Mauriza dkk,

### 2.3 Kerangka Pikir

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Pembangunan Bidang Pendidikan yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. (Mirza, 2012).

Berdasarkan tinjauan teoritis dan beberapa studi empiris maka kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut.:





**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kajian teoritis dan kajian empiris yang telah diuraikan sebelumnya maka diduga bahwa :

- a. DOK bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan pendidikan di wilayah adat tabi provinsi papua.
- b. DOK bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap di wilayah adat tabi pendidikan di provinsi papua.
- c. DOK bidang infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap di wilayah adat tabi pendidikan di provinsi papua.

